



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KRISNA HESTIMADA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 923844

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.465.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/80 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/21 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 118 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/80 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 486 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 554 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 350.000.000
8. Tanah Seluas 348 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **70.000.000**



1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.103.151
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.542.103.151

III. HUTANG Rp. 25.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.517.103.151

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.